

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga dalam menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan kejayaan suatu bangsa yang akan datang, untuk menjadi aset bangsa yang berharga, anak mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi yaitu hak dan kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, zat gizi, bermain, kebutuhan emosional, pengembangan moral serta memerlukan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung bagi kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungannya, anak juga berhak atas peluang dan dukungan untuk mewujudkan dan mengembangkan diri dan kemampuannya.

Anak dapat dikatakan generasi penerus yang menentukan nasib bangsa kelak, karakter anak yang terbentuk sejak dini akan menentukan karakter bangsa dikemudian hari. Karakter anak akan terbentuk dengan baik jika dalam proses tumbuh kembangnya mendapatkan cukup ruang untuk mengekspresikan diri mereka. Anak seyogyanya harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena dimasa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa.

Fenomena membengkaknya anak terlantar di Indonesia merupakan permasalahan kesejahteraan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak terlantar memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada

dalam zona yang tidak jelas masa depannya, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi permasalahan bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat serta negara. Namun, perhatian terhadap anak terlantar tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah dari Allah yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak terlantar. Pada umumnya anak-anak terlantar mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, kurang perhatian dan kasih sayang orang tua serta tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan secara maksimal.

Anak terlantar merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian secara khusus. Selain karena jumlahnya yang cukup besar, masalah anak terlantar memiliki lingkup dan cakupan yang tidak bisa berdiri sendiri namun saling terkait dan saling mempengaruhi bila kebutuhan dan hak mereka tidak terpenuhi. Kondisi ini didasari karena kondisi makro sosial ekonomi yang belum kondusif. Pada sisi lain masih terdapat pemahaman yang rendah mengenai arti penting anak oleh masyarakat, sementara komitmen dan tanggung jawab orang tua atau keluarga yang cukup rendah, sehingga menyebabkan keterlantaran pada anak.

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak terlantar adalah anak yang suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Seseorang anak

dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar disini juga dapat artikan ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembangnya secara wajar. Untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, ketidak mampuan atau kesengajaan (Bagong, 2010: 212).

Hal inilah yang kadang membuat anak terlantar sering hidup dan berkembang dibawah tekanan dari stigma atau dicap sebagai pengganggu ketertiban, yang diperlukan oleh anak-anak tersebut adalah sebagaimana kebutuhan anak-anak pada umumnya, yaitu perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

UUD 1945 pasal 34 tegas dinyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan, pemeliharaan dan pembinaan anak, termasuk pada anak terlantar. Di dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 2 juga disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” termasuk didalamnya anak terlantar.

Secara khusus Indonesia memiliki aturan hukum yang ditunjukan untuk melindungi anak yaitu UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU No 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 6 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.

Indonesia menyelenggarakan (penanganan anak terlantar) diserahkan kepada daerah seiring berlakunya otonomi daerah di Indonesia, maka setiap daerah mempunyai wewenangnya sendiri untuk membuat peraturan atau kebijakan masing-masing. Hal tersebut membuat peraturan di setiap daerah akan berbeda. Semakin banyaknya permasalahan di masyarakat maka semakin banyak pula kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah yang ada. Oleh karena itu setiap daerah yang ada di Indonesia baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota menerima dan menyelenggarakan urusan tersebut termasuk Kota Bandung.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti bahwa penanganan anak terlantar di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung masih kurang efektif, hal tersebut terlihat pada data Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan selaku lembaga yang menangani anak terlantar hanya menargetkan membina 100 anak terlantar dalam setiap tahunnya, sedangkan jumlah anak terlantar di Kota Bandung tahun 2013, 2015, dan tahun 2017 mengalami peningkatan. Dan sumber daya untuk mendukung pembinaan dan penanganan anak terlantar di Kota Bandung masih kurang.

Kota Bandung sendiri mempunyai Peraturan Daerah tentang mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak (penanganan anak terlantar) yang termaktub dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 14 yang menyatakan bahwa “Penelantaran anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan

pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya”.

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Bab V Pasal 34 menyatakan bahwa kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi :

- a. Menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka pendek, menengah, dan panjang.
- b. Pemenuhan hak anak termasuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak.
- c. Mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan.
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan hak anak, mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak.
- e. Mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan pemenuhan hak anak, tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah.
- f. Menyediakan sarana dan prasarana.
- g. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

Saat ini, Pemerintah Kota Bandung terus berupaya untuk mengatasi permasalahan yang menyangkut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terutama dalam hal penanganan Anak Terlantar. Keberadaan anak

terlantar pun tak luput dari permasalahan kompleks yang terjadi di Kota Bandung. Diantaranya permasalahan tentang anak terlantar yang masih terjadi masalah krusial yang harus segera diselesaikan baik oleh masyarakat, lembaga pemerhati anak, terkhusus pemerintah Kota Bandung, sebab hal ini merupakan bentuk eksploitasi pada anak yang seyogyanya anak memperoleh hak pendidikan ataupun pergaulan selayaknya anak-anak pada umumnya, sebab pada hakikatnya tugas anak adalah bermain dan belajar, bukan menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja apalagi dipaksa menjadi tulang punggung keluarganya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung jumlah anak terlantar di Kota Bandung, Yaitu:

Tabel 1.1
Data Anak Terlantar di Kota Bandung

Tahun	Jumlah Anak Terlantar yang ada	Jumlah Target Anak Terlantar yang di bina	Persentase (%)
2013	2,400	100	4.17
2015	2,600	100	3.85
2017	2,800	100	3.57

Sumber: Bid. Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Dilihat dari data diatas jumlah Anak terlantar di Kota Bandung yang didata oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan selaku lembaga pemerintahan yang menangani Anak terlantar. Pada tahun 2013 Anak terlantar di Kota Bandung terdapat 2.400 anak terlantar, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlahnya menjadi 2.600 anak terlantar, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali dari 2.600 anak menjadi 2.800 anak terlantar. Jumlah tersebut

diperkirakan akan terus bertambah atau mungkin bisa berkurang, karena jumlah anak terlantar dilihat dari perkembangan ekonomi setiap tahunnya.

Dilihat dari penanganan anak terlantar yang dibina oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung masih kurang dari 100%. Pada tahun 2013 jumlah anak terlantar yang dibina sebanyak 100 anak dari jumlah keseluruhan anak terlantar sebanyak 2.400, pada tahun 2015 anak terlantar yang dibina sebanyak 100 anak dari jumlah keseluruhan anak terlantar sebanyak 2.600, dan pada tahun 2017 juga anak terlantar yang dibina sebanyak 100 anak saja dari jumlah keseluruhan anak terlantar sebanyak 2.800 anak terlantar.

Tingginya jumlah angka anak terlantar di Kota Bandung dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah masih belum optimalnya upaya penanganan yang serius dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagai pihak yang berwenang dalam menangani Anak Terlantar itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung memiliki tugas untuk melaksanakan sebagai tugas kewenangan daerah di bidang sosial. Oleh karena itu, penanganan anak terlantar di Kota Bandung merupakan salah satu kewajiban dan tanggung jawab dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti bahwa penanganan anak terlantar di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung masih kurang efektif, itu diduga karena pengimplementasian kebijakan yang tidak sempurna, dimana masih ada dimensi dari implementasi kebijakan yang tidak terpenuhi dalam

penerapan kebijakan terlihat dari, kurangnya komunikasi dari pemerintah sehingga anak terlantar belum sepenuhnya mengetahui adanya kebijakan ini misalnya dari sosialisasi langsung maupun sosialisasi melalui media massa ataupun media cetak. Hal ini menyangkut pada strategi untuk mengurangi kenaikan jumlah angka anak terlantar, dimana lembaga yang selaku menangani anak terlantar masih kurang sosialisasi terhadap masyarakat untuk mencegah terjadinya penelantaran pada anak, yang mana pada akhirnya bisa mengurangi jumlah angka anak terlantar.

Kemudian terlihat dari sumber daya yang disediakan, terjadinya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain. Menyangkut pada sumber daya manusianya, yang mana untuk penanganan anak terlantar masih kurang personil dalam yang membantu penanganan anak terlantar. Ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan maka tingkat keberhasilannya akan tinggi. Hal ini menyangkut pada data awal yang mana Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan selaku lembaga yang menangani anak terlantar bahwa dari tahun 2013, 2015 sampai tahun 2017 anak yang di bina oleh lembaga hanya 100 anak terlantar, tidak ada peningkatan pembinaan tiap tahunnya (statis) sedangkan anak terlantar setiap tahunnya bertambah. Kurangnya penanganan yang serius dari pihak yang berkepentingan dikarenakan pihak yang berkepentingan tidak meningkatkan target pembinaan anak terlantar hingga pada akhirnya dapat di bina secara menyeluruh.

Dari permasalahan yang terjadi diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap Efektivitas Penanganan Anak Terlantar Di Kota Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurang efektifnya penanganan anak terlantar di Kota Bandung yang menyebabkan masih banyaknya jumlah anak terlantar.
2. Kurangnya sumber daya yang dibutuhkan dalam penanganan anak terlantar.
3. Komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan mengenai anak terlantar belum optimal

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh komunikasi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh sumber daya terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh disposisi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung?

4. Seberapa besar pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sumber daya terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh disposisi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat kepada peneliti maupun kepada peneliti lainnya yang ingin meneliti tentang pengaruh

implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan anak terhadap penanganan anak terlantar.

b. Bagi Dinas Sosial

Memberikan masukan untuk meningkatkan implementasi penanganan anak terlantar yang terdapat di peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan anak terhadap penanganan anak terlantar.

c. Bagi FISIP

Memberikan masukan untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Negara khususnya teori tentang Implementasi Kebijakan, Perlindungan Anak, Penanganan Anak Terlantar.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan anak terhadap efektivitas penanganan anak terlantar.

b. Bagi Dinas Sosial

Memberikan saran dan rekomendasi yang berguna bagi instansi dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap Efektivitas Penanganan Anak Terlantar.

c. Bagi FISIP

Memberikan masukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam rangka melaksanakan Implementasi

Kebijakan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap Efektivitas Penanganan Anak Terlantar.

1.6 Kerangka Pemikiran

Setiap organisasi memiliki tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan atau pekerjaan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Menurut Handoko (1997:7) dalam bukunya Manajemen, dikatakan bahwa untuk mengukur prestasi kerja manajemen adalah efisiensi dan efektivitas.

Menurut Sedarmayanti (1995: 61), Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi pada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan (efisiensi) kurang menjadi perhatian utama. Karena itu walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Sementara itu menurut Gibson (Zaidan, 2013: 189-190) kajian efektivitas organisasi harus dimulai dari yang paling mendasar terletak pada:

1. Efektivitas individu yaitu tingkat pencapaian hasil kerja individu organisasi.
2. Efektivitas kelompok yaitu tingkat pencapaian hasil kerja yang dilakukan oleh sekelompok anggota organisasi.
3. Efektivitas organisasi yaitu merupakan kontribusi hasil kerja dari tiap-tiap efektivitas individu dan efektivitas kelompok atau tim yang saling sinergis.

Sedangkan efektivitas di dalam pekerjaan pemerintahan menurut Handayani (1996: 16) adalah sebagai berikut:

“Efektivitas di dalam suatu tujuan atau sasaran yang telah dicapai sesuai dengan rencana adalah efektif, tetapi belum tentu efisien. Suatu pekerjaan pemerintah sekalipun tidak efisien dalam arti input dan output, tetapi tercapainya tujuan adalah efektif sebab mempunyai efektivitas atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan masyarakat banyak baik politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya”.

Berdasarkan pengertian tersebut, efektivitas kerja merupakan suatu keberhasilan organisasi yang dijalankan oleh pimpinan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu efektivitas kerja merupakan pengukuran dalam arti sejauhmana organisasi melaksanakan tugas sesuai sasarannya dengan melihat jumlah kualitas dari jasa yang telah dihasilkan berdasarkan target yang telah ditentukan.

Seperti halnya dalam kasus penanganan anak terlantar di Kota Bandung yang masih kurang optimal dalam penanganannya oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Mengacu pada Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut setiap anak dilindungi oleh pemerintah. Tetapi pada kenyataannya masih banyak anak terlantar yang belum bisa ditangani oleh pemerintah karena terbatasnya anggaran yang ditetapkan serta kurangnya sumberdaya manusia yang dapat menangani anak terlantar di Kota Bandung.

Menurut Makmur dalam bukunya Efektifitas kebijakan Kelembagaan Pengawasan (2011: 7-9) kriteria efektivitas dilihat dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Ketepatan penentuan waktu.
- b. Ketepatan perhitungan biaya.
- c. Ketepatan dalam pengukuran.
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

- e. Ketepatan Berpikir.
- f. Ketepatan dalam melakukan perintah.
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan.
- h. Ketepatan sasaran.

Jadi, pada intinya efektivitas akan di bilang berhasil jika masing-masing dimensi dari efektivitas itu terpenuhi. Berbagai pihak bertanggungjawab dalam pemenuhan efektivitas tersebut, salah satunya pemenuhan implementasi kebijakan itu sendiri. Efektivitas itu sangat penting adanya dalam implementasi kebijakan karena efektivitas juga merupakan penentu dari keberhasilan implementasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Anggara, 2018: 232), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul Teori dan Proses Kebijakan Publik menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno, 2005:101).

Pendapat Budi Winarno tersebut sejalan dengan pendapat Riant Nugroho Dwijowijoto dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi yang mengemukakan bahwa:

“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-

program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Dwijowijoto, 2004:158).”

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk program-program serta melalui *derivate*. *Derivate* atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

Pandangan George C. Edward III. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan ini, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Jadi, dalam proses implementasi kebijakan keempat faktor tersebut harus terpenuhi. Implementasi kebijakan sangat penting karena implementasi kebijakan merupakan perwujudan dari perencanaan yang sudah dibangun dalam proses kebijakan. Tanpa adanya implementasi yang baik maka akan sia-sia rencana yang sudah dibuat di tahap awal pembuatan kebijakan. Maka dari dimensi-dimensi yang sudah disebutkan diatas perlu dipenuhi dengan baik agar terciptanya tujuan yang akan dicapai.

Mengimplementasikan suatu kebijakan sangat menentukan apakah suatu organisasi akan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah

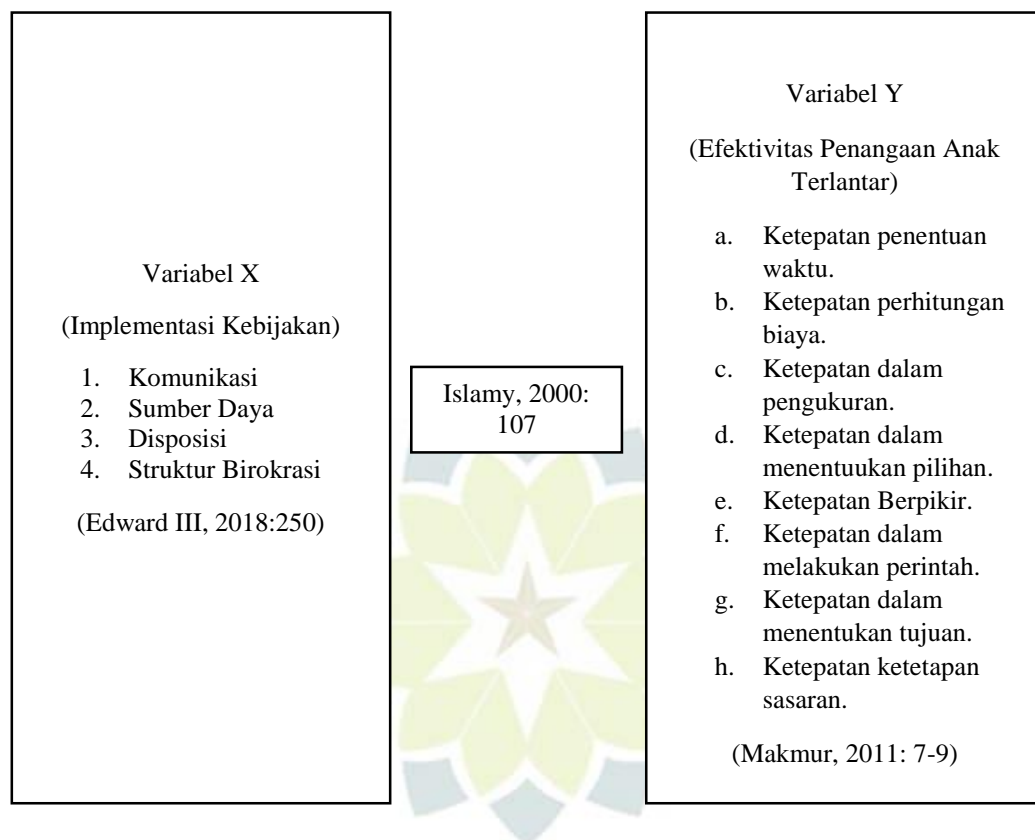
digariskan dalam kebijakan tersebut. Sebelumnya, kebijakan dapat dikatakan diimplementasikan secara efektif jika benar dan menimbulkan dampak atau perubahan perubahan positif.

Adapun yang menggambarkan adanya kaitan antara implementasi kebijakan dengan efektivitas penanganan anak terlantar yang dikemukakan oleh Islamy (2000:107) yang menyatakan bahwa:

”Suatu Implmentasi kebijakan sebuah negara akan efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian kalau mereka tidak bertindak atau berbuat sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara itu, maka kebijakan negara menjadi tidak efektif”.

Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.7 Hipotesis

Menurut Sudjana dalam Kuswana (2011:115) “hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Kebenaran pendapat tersebut perlu diuji dan dibuktikan”.

Menurut Sugiyono (2011: 70) yang mengatakan bahwa:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.”

Bentuk hipotesis yang akan penulis ajukan dalam penelitian ini adalah

hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2011:77).

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan dari dimensi komunikasi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung.
Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari dimensi komunikasi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung.
2. Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan dari dimensi sumber daya terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung.
Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari dimensi sumber daya terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung.
3. Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan dari dimensi disposisi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung.
Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari dimensi disposisi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung.

4. Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan dari dimensi struktur birokrasi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari dimensi struktur birokrasi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung.

5. Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Bandung.

